

Pengembangan Kota Wisata di Kawasan Hutan Konservasi Kecamatan Sekotong, Nusa Tenggara Barat

Development of Tourism City in Conservation-Forest Area of Sekotong District, West Nusa Tenggara

Lalu Akhmad Farhan^{1*}, Imam Buchori¹, Suzanna Ratih Sari¹

¹Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Penulis korespondensi. e-mail: l.farhan0815@gmail.com

(Diterima: 7 April 2023; Disetujui: 27 April 2023)

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor cepat tumbuh yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Sekotong merupakan contoh daerah yang memiliki potensi wisata berkat adanya pariwisata pesisir yang ditunjang oleh peningkatan aksesibilitas pasca pengesahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kecamatan Sekotong sebagai kota wisata. Namun, pertumbuhan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi konservasi dan kelangsungan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan skema Public-Private-People Partnership yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kota wisata berkelanjutan di Kecamatan Sekotong. Penelitian ini perlu dilakukan atas dasar belum banyaknya kajian yang membahas pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong secara komprehensif dan mengkaji rencana tindakan konservasi alam yang diperlukan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kota wisata berkelanjutan dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui foto udara, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil analisis diintegrasikan dan diimplementasikan dalam rencana pelaksanaan dengan menggunakan skema Public-Private-People Partnership. Hasil akhir penelitian ini adalah skema pengembangan kota wisata berbasis Public-Private-People Partnership yang memperhatikan kelestarian alam di sekitarnya. Skema ini secara legal akan diakui sebagai Kerja Sama Usaha (KSU) dan berlaku selama 35 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara keilmuan menjadi tolok ukur penerapan Public-Private-People Partnership dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia serta menjadi inspirasi bagi penulisan karya-karya tulis ilmiah baru dengan tema serupa.

Kata kunci: kota wisata; pariwisata berkelanjutan; Public-Private-People Partnership

Abstract

Tourism is one of the fastest growing sectors proven to boost economic activities in certain regions. Sekotong District is a that has potential due to the existence of its coastal tourism sites and increased accessibility after the development of Mandalika Special Economy Area (KEK). The development of the mentioned attraction unearthed some distresses regarding the function of conservation and the continuity of people's livelihoods in Sekotong District. Previous studies stated that a development scheme that is engineered for local social, economic, and environmental sustainabilities can mitigate problems that are caused by urban-tourism development. This study aims to generate a Public-Private-People Partnership (P4) scheme that can be used as a reference to develop a sustainable tourism hub in Sekotong District. Comprehensive studies about local tourism hub development that puts environmental sustainability in consideration are considered urgent to discuss for previous studies are found to be inadequate. Data collection of orthophoto, field observation, and literature reviews were used to identify local tourism development necessities. Further outputs will then be formulated to a P4 tourism development scheme. Development approaches from this research is expected to contribute to local tourism advancement while also keeping environmental sustainability in concern. This scheme will be acknowledged legally as a 35-year-long corporate-state joint business scheme. This research is expected to contribute scientifically as a benchmark for practical P4 schemes in Indonesia's tourism development. Future researches regarding local tourism developments and sustainabilities are also expected to use this study as a reference.

Keywords: public-private-people partnership; sustainable tourism; tourism based urban development

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi (Buckley, 2013). Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggalakkan pengembangan pariwisata melalui pencaanangan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Proyek-proyek Strategis Nasional tersebut ditargetkan untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara, kontribusi Pendapatan Daerah Bruto (PDB), lapangan pekerjaan, dan angka *Travel and Tourism Competitiveness Index*. Berdasarkan PSN, terdapat 29 dari 222 proyek yang merupakan proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri dan pariwisata.

Pulau Lombok merupakan salah satu daerah yang memperoleh porsi PSN berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2022). KEK ini direncanakan menjadi hub pariwisata alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu kelebihan Mandalika adalah mudah diakses oleh moda transportasi darat, laut, dan udara melalui Jalan Raya Bypass Bandara Internasional Lombok, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), dan Pelabuhan Lembar (Horwath, 2017; Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, 2022). Keterjangkauan ini mendukung KEK Mandalika sebagai tempat pusat aktivitas wisata di Pulau Lombok (Monzón et al., 2013; X. Wang et al., 2012).

Keberadaan tempat pusat kegiatan yang terintegrasi dengan jaringan infrastruktur merupakan peluang untuk mengembangkan koridor-koridor wisata baru di sekitarnya (Kowalczyk-Aniol, 2023; X. Wang et al., 2012). Konsentrasi aktivitas pariwisata di suatu pusat akan mencapai suatu titik jenuh dan mendorong pengunjung ke destinasi-destinasi lain di sekitarnya. Fenomena ini disebut sebagai *diffusion effect* (Wan et al., 2015). Limpahan pengunjung yang disertai oleh aliran barang dan jasa dari dan menuju pusat wisata akan membentuk jaringan aktivitas pariwisata yang terintegrasi (Lee et al., 2013).

Kajian Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena 2020-2044 memproyeksikan bahwa akan ada lebih dari 12 juta pengunjung yang berwisata di Pulau Lombok pada tahun 2045. Proyeksi tersebut memunculkan kemungkinan destinasi Mandalika mencapai titik jenuh apabila tidak diimbangi dengan tindakan pengembangan yang memadai. Skenario *diffusion effect* yang dapat terjadi apabila Mandalika mencapai titik jenuh perlu ditanggapi dengan perencanaan pengembangan destinasi di sekitarnya yang mampu menampung limpahan wisatawan. Perencanaan pengembangan tersebut juga perlu mempertimbangkan keterlibatan sektor privat dan masyarakat setempat untuk mengurangi beban manajemen pemerintah setempat (Wan et al., 2022; Zhang & Kumaraswamy, 2012).

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang terintegrasi dengan KEK Mandalika melalui Jalan Raya Sekotong. Kecamatan ini memiliki destinasi wisata bahari bernama Desert Point yang berlokasi di tengah Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-bangko. Destinasi ini masuk dalam salah satu rekomendasi pengembangan wisata di Pulau Lombok di kajian The World Bank dan Horwath. Peningkatan laju perjalanan pasca dibangunnya Jalan Raya Bypass Bandara Internasional Lombok juga merupakan alasan Kecamatan Sekotong menjadi destinasi wisata yang layak dikembangkan (Horwath, 2017; Khafid, 2021).

Pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong juga perlu mempertimbangkan kelangsungan hidup masyarakat dan fungsi konservasi yang diampu oleh TWA Bangko-bangko (Azzali et al., 2020; Hernandez et al., 2023; Milano et al., 2019). Pengembangan dan pengelolaan kawasan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di sekitar kawasan pariwisata dapat menimbulkan gangguan terhadap daya dukung lingkungan dan gesekan sosial dengan masyarakat (Arabadzhyan et al., 2020; Belgrano & Villasante, 2020; Milano et al., 2019). Penolakan masyarakat dan kerusakan lingkungan diketahui sudah terjadi di TWA Bangko-bangko. Masyarakat yang menolak penetapan TWA Bangko-bangko menjarah hutan dan membuka ladang jagung baru di area konservasi (BKSDA NTB, 2018; Rakhman, 2019).

Ekosistem pesisir yang sensitif terhadap perubahan yang sangat ekstrem juga perlu diberi perhatian khusus (Arabadzhyan et al., 2020). Frekuensi kunjungan yang terlalu sering dan jumlah pengunjung yang terlalu banyak dapat mengganggu kelangsungan ekosistem alam setempat (Costanza et al., 2014; P. Wang et al., 2022). Kerusakan pada ekosistem pantai dapat mengurangi nilai jual yang menjadi daya tarik pariwisata pesisir itu sendiri. Perencanaan pengembangan destinasi wisata perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pariwisata (Costanza et al., 2014). Pertimbangan tersebut nantinya akan berujung pada pembatasan jumlah pengunjung dan/atau jumlah kunjungan yang menyesuaikan kapasitas tampungan destinasi wisata.

Urgensi pemanfaatan potensi destinasi wisata dan pengawalan fungsi konservasi TWA Bangko-bangko merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pengembangan pariwisata. Wan & Bramwell (2015) mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata yang efektif memerlukan kondisi dimana pemerintah memiliki peran yang minimal dan dapat melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Hal ini bermakna bahwa pemerintah lokal tidak perlu menanggung seluruh peran dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pemerintah dapat berperan sebagai koordinator yang mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan pelaku usaha sektor privat yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut (P. Wang et al., 2022). Pelaku usaha sektor privat yang terlibat dalam skema ini dapat mengkomersialisasikan komoditas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Jamnadass et al., 2014). Masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam pengembangan wisata berkelanjutan. Zhang & Kumaraswamy (2012) menemukan bahwa masyarakat lokal memiliki pemahaman tentang budaya, sejarah, dan adat di lokasi asalnya. Pengetahuan tersebut perlu dimanfaatkan karena destinasi wisata dapat lebih menonjolkan nilai lokalnya dan pengembangan lokasi wisata dapat dilakukan selaras dengan kehidupan masyarakat lokal (Wan et al., 2022; Zhang & Kumaraswamy, 2012). Urgensi penyusunan penelitian ini timbul karena belum banyaknya kajian yang membahas pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong secara komprehensif khususnya terkait rencana tindakan konservasi alam dan tindakan integrasi dengan masyarakat yang.

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan skema pengembangan pariwisata berkelanjutan yang komprehensif serta selaras dengan kebutuhan tindakan pelestarian lingkungan alam di TWA Bangko-bangko dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Sekotong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembahasan topik *urban development based on tourism* di kota-kota pesisir di Indonesia. Keluaran skema pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan percontohan dalam pengembangan destinasi wisata pesisir di seluruh dunia.

2. KAJIAN TEORI

2.1 TREN PARIWISATA PESISIR DI ABAD 21

Daerah pesisir merupakan salah satu jenis destinasi wisata yang mengalami peningkatan kepopuleran dalam beberapa dekade terakhir (Kurniawan et al., 2016). Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Tahun 2020-2045 menyebutkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2018 melebihi 1 juta orang. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga 12 juta orang pada tahun 2045. Sebagian besar pengunjung juga diproyeksikan berasal dari daerah yang tidak memiliki iklim tropis, seperti Benua Eropa. Daerah pesisir banyak diminati karena kemampuannya memberikan *sense of place* yang berlawanan dengan hiruk-pikuk kawasan pusat kota dan memiliki iklim yang berbeda dibandingkan daerah asal wisatawan (untuk kasus wisatawan mancanegara) (Carlsen & Butler, 2011; Horwath, 2017).

Peningkatan permintaan barang dan jasa membuat banyak masyarakat setempat menggantungkan mata pencariannya terhadap kegiatan pariwisata di destinasi pesisir (Deely et al., 2023; Wabnitz, 2019). Konsentrasi kegiatan wisata di daerah pesisir ditemukan mengakibatkan degradasi terhadap ekosistem fisik pantai. Hal ini dikarenakan ekosistem pesisir diketahui sangat sensitif terhadap intervensi yang timbul dari aktivitas di sekitarnya (Hernandez et al., 2023). Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tidak memperhatikan kelangsungan ekosistem seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan endemik (Hernandez et al., 2023; Wabnitz, 2019). Kearifan lokal masyarakat setempat juga dapat memudar karena biasanya insentif dari kegiatan pariwisata hanya diberikan untuk penyediaan komoditas pariwisata (Macleod, 2004). Budaya-budaya sosial yang tidak selaras dengan kebutuhan kegiatan pariwisata biasanya tidak mendapat insentif. Kondisi ini mengubah persepsi masyarakat menjadi lebih akomodatif terhadap penyediaan komoditas pariwisata dibandingkan budaya lokal (Carlsen & Butler, 2011; Macleod, 2004).

2.2 PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pulau Lombok merupakan daerah yang memiliki banyak potensi destinasi wisata alam (Horwath, 2017). Destinasi snorkeling dan *tracking* di habitat terumbu karang dan hutan-hutan yang berisi flora dan fauna langka merupakan beberapa contoh potensi yang dijual pengembang pariwisata di Pulau Lombok (First Lombok Tour, 2019; Horwath, 2017; Sideman et al., 2022). Potensi tersebut merupakan pedang bermata dua bagi aktivitas pariwisata di Pulau Lombok. Potensi wisata alam di Lombok mendorong eksploitasi sumber daya alam. Sementara di sisi lainnya, sumber daya tersebut perlu dijaga agar Pulau Lombok tetap memiliki nilai jual sebagai destinasi pariwisata.

Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang memperhatikan alokasi sumber daya alamnya demi mencukupi kebutuhan generasi yang akan datang (Ayaz, 2012). Pendekatan ini tidak hanya membahas komponen *attraction, accessibility, amenity, available packages, activities, dan ancillary services* (Buhalis, 2002).

Keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat lokal, keuntungan dari aktivitas pariwisata, dan kelestarian lingkungan alam juga perlu diperhatikan (Ivars-Baidal et al., 2021). Pendekatan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengembangan pariwisata di wilayah studi.

2.3 PENGEMBANGAN KOTA WISATA DI KECAMATAN SEKOTONG

Kecamatan Sekotong merupakan salah satu lokasi yang memiliki potensi pariwisata di Pulau Lombok. Dusun ini memiliki destinasi wisata selancar bernama Desert Point. Destinasi ini menjadi salah satu lokasi favorit peselancar karena kualitas ombaknya yang baik. Selain itu, Desert Point juga memiliki daya tarik wisata snorkeling (Francis, 2022; Smart et al., 2022). Desert Point masuk dalam rekomendasi lokasi pengembangan wisata dalam *policy brief* berjudul *Lombok Baseline Demand and Supply, Market Demand Forecasts, and Investment Needs* oleh Horwath (2017).

Desert Point sudah memiliki fasilitas akomodasi seperti *resort* dan hotel. Kecamatan Sekotong dan daerah-daerah di sekitarnya juga sudah mengalami perkembangan setelah dibangunnya KEK Mandalika. Penyediaan infrastruktur-infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan listrik tegangan tinggi telah memasuki tahap pra-konstruksi sejak tahun 2021 (Khafid, 2021). Pembangunan infrastruktur penunjang tersebut meningkatkan kesiapan Kecamatan Sekotong untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata (Buhalis, 2002). Adanya kebutuhan untuk menunjang KEK Mandalika juga mendorong urgensi pengembangan Kecamatan Sekotong sebagai lokasi pariwisata. Sekurang-kurangnya berdasarkan paparan tersebut, destinasi wisata di Kecamatan Sekotong sudah memiliki komponen aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan aktivitas (Buhalis, 2002; Buhalis & Law, 2008; Navío-Marco et al., 2021). Adanya pengembangan lebih lanjut yang bersifat terpusat dan terstruktur dapat membantu melengkapi komponen kebutuhan destinasi wisata di Kecamatan Sekotong.

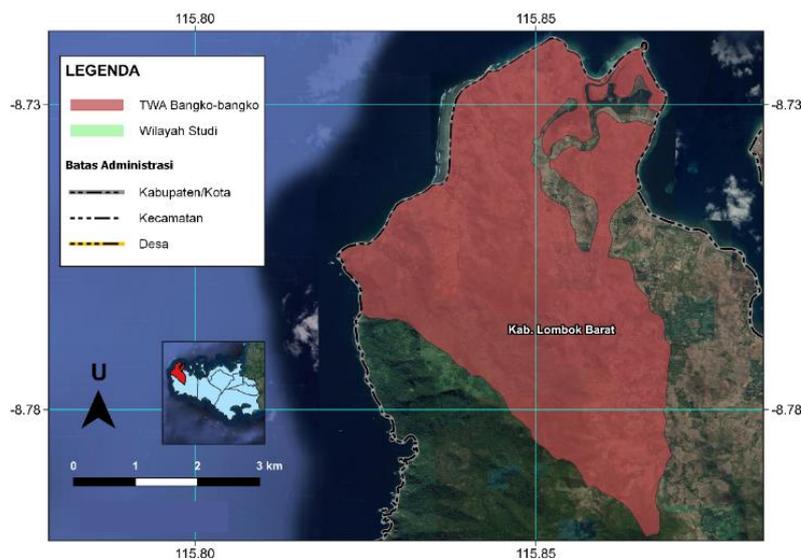
Pengembangan kawasan urban berbasis pariwisata (kota wisata) merupakan salah satu wujud pemusatan dan strukturisasi aktivitas pariwisata (Chaolin, 2020; Kowalczyk-Aniol, 2023). Kajian-kajian terdahulu telah membuktikan bahwa pariwisata memiliki potensi sumbangan devisa yang signifikan (Duignan, 2019). Potensi tersebut mendorong banyak daerah yang memiliki potensi wisata untuk melakukan pengembangan secara fisik dan nonfisik (Amore, 2019; Gospodini, 2020). Model pengembangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata, menarik wisatawan, dan memperoleh devisa dari kegiatan pariwisata (Amore, 2019). Kawasan perkotaan yang mendukung fungsi pariwisata merupakan buah dari model pengembangan tersebut.

Topik pengembangan kota wisata mulai populer pada dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi yang memangkas birokrasi dari wisatawan ke penyedia barang/jasa berkontribusi signifikan terhadap maraknya pengadopsian model ini (Buhalis & Law, 2008; Kowalczyk-Aniol, 2023; Navío-Marco et al., 2021). Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa model ini menimbulkan disrupsi terhadap model permukiman, standar pelayanan instansi pemerintah lokal, dan harga pasar properti di daerah yang memiliki potensi wisata (Milano et al., 2019; Zmyslony & Kowalczyk-Aniol, 2019). Disrupsi ini seringkali menimbulkan penolakan masyarakat terhadap rencana pengembangan kota wisata di daerah yang sudah memiliki aktivitas permukiman (Kowalczyk-Aniol, 2023; Zmyslony & Kowalczyk-Aniol, 2019).

Kowalczyk-Aniol (2023) mengatakan bahwa pengembangan kota wisata wajib menitikberatkan pada *urban regeneration*. Konteks *regeneration* dalam pengembangan kota wisata bermakna pelestarian aktivitas dan struktur fisik yang vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Amore, 2019). Kekhasan yang timbul dari pemilihan tindakan tersebut dapat meningkatkan nilai jual suatu kota wisata (Amore, 2019; Romanczyk, 2018). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengembangan kota wisata dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pengembang kota wisata dan pemerintah setempat (Wan et al., 2022). Gesekan yang timbul antara kepentingan pengembangan kota wisata dengan keberlanjutan mata pencarian masyarakat setempat juga dapat dikurangi dengan penerapan *urban regeneration* (Milano et al., 2019).

2.4 PENGELOLAAN LAHAN KONSERVASI OLEH PELAKU USAHA SEKTOR PRIVAT

Taman Wisata Alam (TWA) Bangko-bangko merupakan kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan wilayah studi. TWA ini diresmikan pada 1 Juli 1992 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 664/Kpts-II/92/76. Area konservasi di TWA Bangko-bangko memiliki luas 2.610,17 hektar dengan flora yang dilindungi antara lain bajor, kesambi, dan waru. Sementara itu, fauna yang dilindungi di kawasan ini antara lain koakiau, elang bondol, ayam hutan, kera ekor panjang, trenggiling, dan babi hutan (First Lombok Tour, 2019). Aktivitas konservasi dan wisata di TWA Bangko-bangko yang tidak disetujui masyarakat berakibat pada penjarahan sumberdaya hutan (BKSDA NTB, 2018). Kurangnya kemampuan pengelola TWA Bangko-bangko untuk menggalakkan fungsi konservasi hutan menimbulkan urgensi pendekatan konservasi baru.



Gambar 1. Taman Wisata Alam Bangko-bangko

Komersialisasi merupakan salah satu pendekatan yang belum banyak dibahas dalam kegiatan konservasi alam (Chidakel & Child, 2022; Saayman et al., 2018). Pendekatan ini diketahui dapat menunjang fungsi konservasi sembari menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya. Kasus-kasus konservasi dengan pendekatan *wildlife tourism*, *hunting*, dan *livestock* di Indonesia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat merupakan beberapa contoh keunggulan sektor privat dibandingkan dengan sektor publik (Bates & Hersey, 2016; Saayman et al., 2018; Shine & Somaweera, 2019). Keluaran pengelolaan dari skema komersialisasi, dihitung dengan satuan ekor dan tutupan vegetasi dalam kasus konservasi alam, diketahui lebih unggul dari periode pengelolaan sektor publik (Bates & Hersey, 2016; Godoy et al., 2022). Keunggulan yang dimiliki oleh pelaku usaha sektor privat dibandingkan sektor publik dari sisi pengelolaan antara lain kemampuan pengendalian konflik antar *stakeholders*, fleksibilitas pengaturan porsi keuntungan dan keberlanjutan kegiatan konservasi, konsentrasi anggaran, dan kemampuan *research and development* (Bates & Hersey, 2016; Shine & Somaweera, 2019).

Nilai jual flora dan fauna komoditas konservasi merupakan hal yang meningkatkan daya tarik dan penghasilan bagi pengelola destinasi wisata alam (Saayman et al., 2018). Namun, praktik-praktik komersialisasi terdahulu memberikan beberapa *lessons learned* untuk penerapan skema ini kedepannya. Kondisi-kondisi tertentu dapat mengganggu keseimbangan antara keuntungan komersial dan keberlanjutan konservasi. Hal-hal yang perlu diawasi dalam kegiatan komersialisasi situs konservasi antara lain (Bates & Hersey, 2016; Godoy et al., 2022; Shine & Somaweera, 2019):

- a. kemungkinan risiko gangguan komoditas konservasi terhadap aktivitas permukiman, komersial, dan industri;
- b. agenda politik yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan konservasi untuk pariwisata;
- c. penolakan masyarakat setempat terhadap kegiatan konservasi dan/atau komersialisasi;
- d. ketergantungan terhadap sektor pariwisata dapat meningkatkan kerentanan situs konservasi terhadap kondisi ekonomi global; dan
- e. kemungkinan gangguan akibat perubahan iklim.

2.5 SKEMA PENGELOLAAN *PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP* DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA

Skema *Public-Private-People Partnership* (4P) merupakan pengembangan dari *Public-Private Partnership* (PPP). Model PPP pertama kali dibentuk di Amerika Serikat yang merupakan suatu metode pembiayaan yang memberikan potensi penyelesaian terhadap masalah urbanisasi, transfer inovasi, dan ilmu pengetahuan (Beh, 2015). Salah satu tujuan pengembangan konsep ini adalah pelimpahan tanggung jawab pemerintah ke pihak ketiga untuk menjaga efektivitas manajemen pemerintahan (Wan et al., 2022). Skema ini biasa diterapkan dalam skenario kurang memadainya kemampuan pemerintah dalam menangani situasi tertentu (Wan & Bramwell, 2015).

Secara konseptual, model PPP dalam praktiknya memiliki beberapa keuntungan: 1) Percepatan dari penyediaan modal untuk pembangunan infrastruktur; 2) Adanya pengalihan tanggung jawab desain dan konstruksi kepada pihak swasta dan dikombinasikan dengan pembiayaan oleh pemerintah; 3) Adanya pengurangan biaya yang tidak perlu selama masa penggunaan proyek yang dilakukan oleh pemerintah-swasta; 4) Adanya alokasi risiko kepada pihak yang paling kompeten

untuk menanganinya sehingga pihak swasta akan memperbaiki kualitas manajemennya dan berkinerja berdasarkan pengalaman internasional; 5) Pihak swasta diharapkan lebih mampu untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada masa operasional sehingga subsidi pemerintah dapat dikurangi; dan 6) Pemerintah akan berperan sebagai regulator dan dapat memfokuskan perannya pada rencana program pelayanan dan pengawasan (European Commission, 2003). Kondisi ini dimungkinkan melalui pelimpahan tanggung jawab pelayanan masyarakat kepada pihak swasta.

Penambahan aspek *people* pada model PPP merupakan bentuk penyertaan partisipasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pengikutsertaan masyarakat adalah kepuasan masyarakat itu sendiri sebagai *end user* hasil kerjasama antara pemerintah dan pihak ketiga (Wan & Bramwell, 2015; Wan et al., 2022). Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan skema *Public-Private-People Partnership*.

Kerja Sama Usaha (KSU) merupakan salah satu skema kerjasama antar *stakeholder* pembangunan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Skema ini berbentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu tertentu (30-50 tahun per kontrak kerjasama) dengan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara pihak swasta dengan badan pemilik BMN. Skema ini menjadi alternatif pertimbangan karena adanya urgensi untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN, meningkatkan pemasukan kas nonpajak, dan menghalau penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Mitra KSU memiliki peran sebagai pembangun dan pengelola situs BMN yang keuntungannya akan diserahkan kepada badan pemilik BMN.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang skema pengembangan kota wisata di Kecamatan Sekotong ini memiliki sifat deduktif. Penelitian ini akan melakukan pengamatan menggunakan metode orthophoto, observasi lapangan, dan telaah dokumen terhadap daerah studi menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang sudah ada. Analisis deskriptif kemudian akan dilakukan untuk membahas temuan-temuan pengamatan. Keluaran analisis kemudian akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kota wisata di wilayah studi. Rekomendasi tindakan-tindakan pengembangan kemudian akan dihasilkan dan disusun ke dalam skema kerjasama *public-private-people* yang padu.

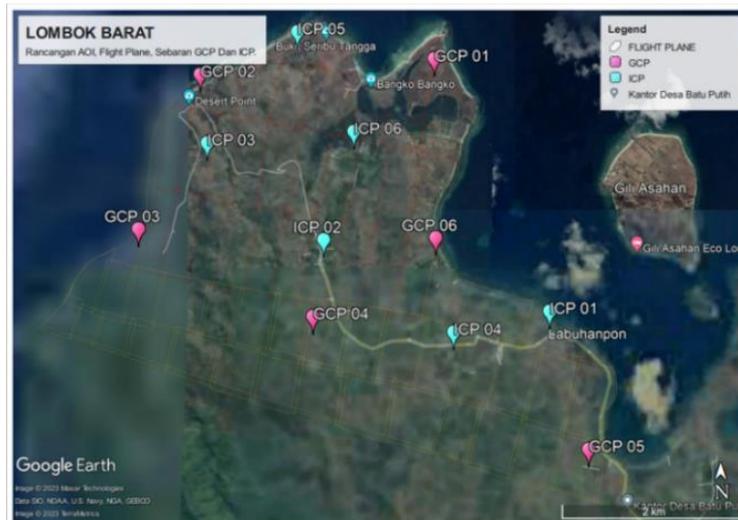
3.1 ORTOPHOTO

Pendekatan *orthophoto* atau foto udara akan dilakukan dengan menggunakan pesawat nirawak dan pendekatan *Global Navigation Satellite System* (GNSS). Pengambilan gambar dimulai dengan penentuan rute penerbangan (*flight plan*) dan penerbangan wahana nirawak. Gambar akuisisi kemudian diuji akurasinya mengacu pada *Ground Control Point* (GCP) dan *Independent Control Point* (ICP). Titik-titik pengujian terdiri atas 6 buah GCP dan 6 buah ICP. Model spasial hasil akuisisi pesawat nirawak kemudian digunakan sebagai acuan luas kawasan yang akan dikembangkan sebagai kota wisata berkelanjutan di Kecamatan Sekotong (Rai et al., 2021).



Sumber: Analisis, 2023

Gambar 2. *Flight Plan* Penelitian



Sumber: Analisis, 2023

Gambar 3. Sebaran Ground Control Point (GCP)

3.2 OBSERVASI LAPANGAN

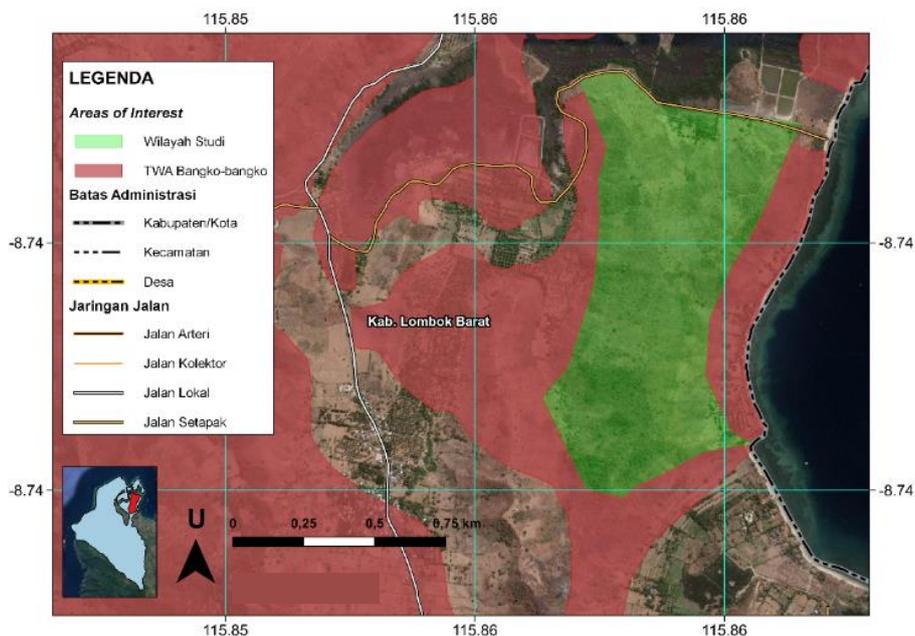
Penelitian ini akan menggunakan observasi lapangan untuk memaparkan *sense of place* di wilayah studi. Pendekatan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipatoris. Pendekatan ini menitikberatkan pada posisi peneliti yang tidak terlibat menjadi subjek penelitian (Ritzer, 2007). Lavia et al. (2018) mengatakan bahwa pendekatan ini meminimalisir intervensi pengaruh observasi terhadap subjek atau fenomena penelitian.

3.3 TELAHAH DOKUMEN

Hasil foto udara dan observasi lapangan akan diolah dalam telaah dokumen lebih lanjut. Studi pustaka dilakukan untuk mencocokkan kebutuhan pengembangan kota wisata dan tindakan konservasi dengan skema kerjasama P4. Pendekatan ini juga akan digunakan. Keluaran analisis ini adalah rekomendasi pendekatan kerjasama legal dengan pengelola BMN. Analisis ini juga akan menghasilkan skema pengembangan kota wisata berbasis *Public-Private-People Partnership*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KILAS PANDANG KAWASAN PENGEMBANGAN KOTA WISATA



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2011

Gambar 4. Delineasi Wilayah Studi

Hasil *ortophoto* dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan kota wisata di wilayah studi dapat dilakukan pada bagian utara Kecamatan Sekotong. Luas area yang dapat dialokasikan untuk pengembangan kota wisata adalah sekitar 75 Ha (3,45% total luas TWA Bangko-bangko). Penguasaan atas lahan ini dipegang oleh PT. Putra Bangko-bangko Sejati yang diputuskan melalui S.93/Menhut-II/2011 pada 2 Maret 2011. SK tersebut mencantumkan bahwa persil lahan ini dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang turut memperhatikan keberlangsungan kegiatan konservasi di sekitarnya.

Lokasi rencana pengembangan kota wisata dapat diakses menggunakan moda transportasi darat dan laut. Akses melalui jalan darat tersedia di sebelah utara dan selatan area rencana pengembangan. Jalan tersebut merupakan jalan setapak yang berupa tanah berbatu dan dapat berubah menjadi lumpur di musim hujan. Kondisi ini mengharuskan penggunaan kendaraan dengan kemampuan lintas medan bagi pengunjung lokasi yang akan melalui jalan darat sedangkan, akses melalui laut dapat ditempuh menggunakan perahu-perahu yang disewakan di dermaga-dermaga kecil.

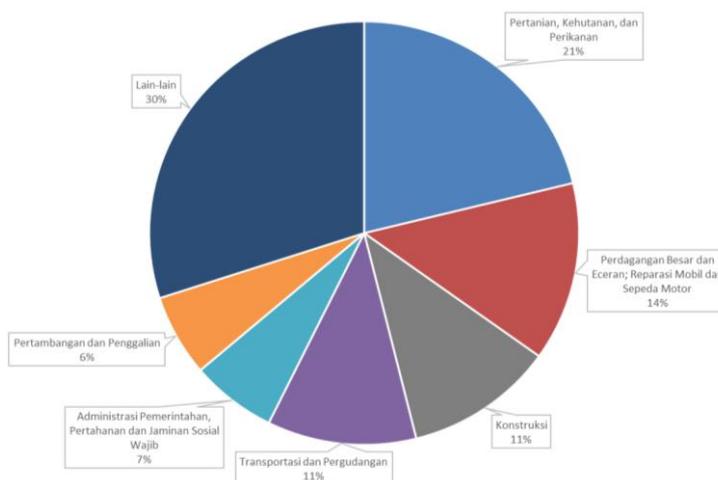


Sumber: Observasi Lapangan, 2023

Gambar 5. Akses dari dan menuju Lokasi Rencana Kota Wisata

Belum memadainya fasilitas-fasilitas kritis seperti jaringan air bersih, infrastruktur telekomunikasi, jaringan jalan, dan fasilitas kesehatan mengurangi kelayakan lokasi ini sebagai daerah pengembangan. Penyediaan fasilitas-fasilitas kritis perlu dijadikan perhatian utama dalam pengembangan kota wisata di wilayah studi (Buhalis, 2002; Buhalis & Law, 2008). Pengembangan infrastruktur yang akan digunakan dalam jangka panjang memerlukan komitmen dari masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan pariwisata. Kondisi ini mengharuskan adanya kerjasama multipihak yang melibatkan pengembang dan pengelola, masyarakat setempat, serta pemerintah daerah (Wan et al., 2022; Zhang & Kumaraswamy, 2012).

4.2 AKTIVITAS EKONOMI DAN MATA PENCARIAN MASYARAKAT WILAYAH STUDI



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2023

Gambar 6. Proporsi PDRB ADHB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022

Perikanan tangkap merupakan salah satu mata pencarian dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Lombok Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat (2022) menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan Lombok Barat memiliki porsi paling besar (21%) dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan penggerak ekonomi yang paling dominan di Kabupaten Lombok Barat. Temuan ini diperkuat oleh data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (2019) yang menunjukkan bahwa jumlah nelayan (5.175 orang) dan hasil produksi perikanan tangkap nelayan Lombok Barat (13.059 ton) masuk dalam lima besar Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan animo pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Horwath, 2017; Presiden Republik Indonesia, 2020). Peluang ini banyak dimanfaatkan oleh para nelayan pemilik perahu untuk terlibat dalam sektor pariwisata. Observasi wilayah studi lebih lanjut menunjukkan bahwa perahu-perahu yang telah selesai digunakan untuk menangkap ikan banyak disewakan untuk mengangkut wisatawan. Perahu yang disewakan umumnya digunakan untuk berpesiar atau sebagai moda penyeberangan ke pulau-pulau yang berdekatan seperti Gili Goleng dan Gili Asahan.



Sumber: Observasi lapangan, 2023

Gambar 7. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Sekotong

Kecamatan Sekotong juga merupakan salah satu daerah penyumbang komoditas pertanian lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini merupakan daerah produsen padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2022). Masyarakat petani di Kecamatan Sekotong diketahui pernah mengalami gesekan kepentingan dengan pengelola area konservasi di TWA Bangko-bangko (BKSDA NTB, 2018; Rakhman, 2019). Masyarakat petani yang membuka lahan pertanian di dalam area TWA Bangko-bangko dinilai telah mengganggu keberlangsungan kegiatan konservasi. Perselisihan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terkait kegiatan konservasi di TWA Bangko-bangko.

Kasus-kasus pelaksanaan aktivitas konservasi yang kurang memperhatikan aktivitas masyarakat sebelumnya dapat dijadikan *lesson learned* dalam pengembangan kota wisata. Perencanaan pengembangan kota wisata di wilayah studi harus dapat menggandeng masyarakat untuk terlibat mengembangkan komoditas pariwisata yang dijajakan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kota wisata dapat mengakibatkan penolakan yang berujung pada hambatan dan gangguan aktivitas pariwisata (BKSDA NTB, 2018; Rakhman, 2019). Studi Wan & Bramwell (2015) menunjukkan bahwa kegiatan sosial masyarakat dapat memberikan sumbangsih kearifan lokal dalam pengembangan atraksi pariwisata. Keberadaan jasa transportasi dan *guide* pesiar yang memanfaatkan daya tarik pemandangan alam dan potensi interkoneksi antar pulau di Kecamatan Sekotong merupakan potensi kerjasama yang dapat diwacanakan dalam perencanaan pengembangan kota wisata.

4.3 KEBIJAKAN EKSTING PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Pulau Lombok merupakan salah satu daerah prioritas pengembangan yang dicanangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. Pulau ini akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki fungsi pariwisata dan wewenang otonomi pengelolaan. Pengembangan tersebut difokuskan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. PP tersebut lebih lanjut memaparkan adanya rencana pembangunan infrastruktur-infrastruktur kritis seperti fasilitas akomodasi, jalan raya, dan infrastruktur penjernihan air. Fasilitas-fasilitas tersier seperti KEK ini terintegrasi dengan daerah studi melalui Jalan Raya Bypass Bandara Internasional Lombok. Kondisi ini memposisikan KEK Mandalika sebagai acuan *best practices* dan kawasan induk yang menunjang kebutuhan pengelolaan kota wisata di wilayah studi.

Pemerintah pusat bekerjasama dengan The World Bank melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Tahun 2020-2044 juga mencanangkan program pengembangan

destinasi pariwisata di Kabupaten Lombok Barat hingga tahun 2044. Kebijakan tersebut menempatkan Kecamatan Sekotong dalam *Key Tourism Area* (KTA) Pantai Selatan. Gili Nanggu, Gili Gede, dan Teluk Mekaki adalah daerah prioritas pengembangan wisata bahari, olahraga, dan desa tradisional dalam kebijakan tersebut. Keterhubungan destinasi-destinasi tersebut dengan lokasi rencana kota wisata melalui jalur darat (via Jalan Raya Siung) dan jalur laut merupakan potensi atraksi wisata pesiar dan terusan yang dapat diwacanakan dalam rencana pengembangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 juga menetapkan Kecamatan Sekotong sebagai kawasan strategis yang memiliki fungsi pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, serta perikanan dan pertanian. Arahan pemanfaatan ini sudah selaras dengan kegiatan eksisting dan rencana pengembangan kota wisata. Kecamatan ini juga direncanakan untuk menjadi daerah pusat kegiatan dengan skala layanan kabupaten/kota. Adanya hub pariwisata baru dapat berkontribusi mempercepat implementasi RTRW. Hal ini disebabkan karena pengembangan pusat layanan akan meningkatkan konsentrasi aliran barang dan jasa ke daerah tersebut (Chaolin, 2020). Pemusatan tersebut akan meningkatkan kemampuan suatu tempat pusat untuk memberikan layanan ke daerah-daerah di sekitarnya (Christaller, 1980).

4.4 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOTA WISATA

Wilayah rencana pengembangan kota wisata merupakan daerah pesisir yang memiliki kearifan lokal berupa aktivitas sosial dan ekonomi, keindahan alam, dan potensi pariwisata. Pengembangan kota wisata yang akan dilakukan di area konservasi perlu memperhatikan keberlanjutan kondisi-kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi lapangan, *ortophoto*, dan telaah dokumen untuk mengidentifikasi item yang wajib dimasukkan dalam pengembangan kota wisata. Kebutuhan-kebutuhan pengembangan kota wisata Kecamatan Sekotong sebagai berikut:

- a. Perbaikan akses darat dari, menuju, dan dalam wilayah studi;
- b. Pengembangan rute interkoneksi antar gili dengan daratan utama;
- c. Penyediaan infrastruktur kritis;
- d. Urgensi pelaksanaan konservasi di TWA Bangko-bangko;
- e. Pendekatan pengelolaan kota wisata berkelanjutan.

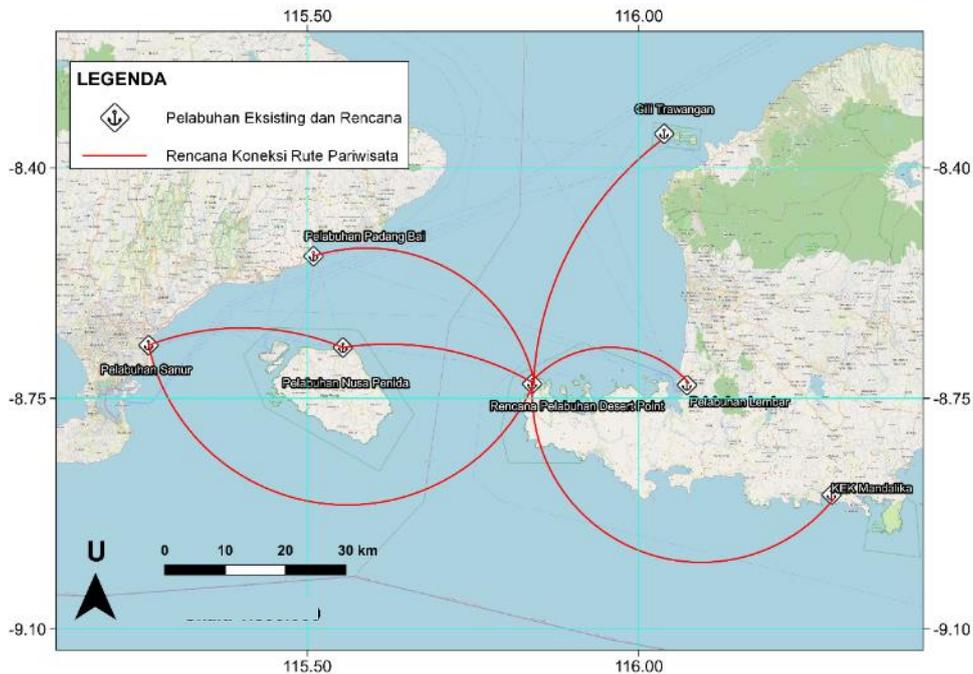
4.5 RENCANA PENGEMBANGAN KOTA WISATA

Pengembangan kota wisata di wilayah studi akan menggunakan skema Kerjasama Usaha (KSU) yang dilaksanakan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. KSU merupakan skema kerjasama saling menguntungkan yang melimpahkan hak pengelolaan sepenuhnya ke pihak swasta tanpa keterlibatan pengelola Barang Milik Negara (BMN). Skema ini dipilih untuk menjaga independensi pengelolaan kota wisata, memperoleh laba dari pengelolaan kota wisata berkelanjutan, dan adanya urgensi pengurangan beban manajemen stakeholder lokal (Bates & Hersey, 2016; BKSDA NTB, 2018; Godoy et al., 2022; Rakhman, 2019; Shine & Somaweera, 2019). Pengembangan dan pengelolaan kota wisata akan dilaksanakan dalam rentang 35 tahun. Perpanjangan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku apabila ada potensi pengembangan di luar wilayah studi.

Bentuk tindakan konservasi yang akan dilakukan dalam pengembangan kota wisata di Kecamatan Sekotong adalah pembatasan jumlah pengunjung. Pemasaran kota wisata sebagai destinasi wisata eksklusif akan menjadi media pembatasan. Tindakan ini diperlukan untuk menjaga keasrian area konservasi dan keberlangsungan aktivitas masyarakat di area pengembangan kota wisata. Intensitas kunjungan yang terlalu tinggi dapat menghilangkan unsur kearifan lokal di suatu destinasi wisata (Hernandez et al., 2023). Studi Kokkranikal & Baum (2011) membuktikan bahwa pengelolaan situs pariwisata yang menjaga sifat "keterpencilannya" merupakan kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Peluang interkoneksi antargili dan pulau-pulau di sekitar Lombok melalui jalur laut merupakan potensi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan atraksi di kota wisata rencana (Buhalis, 2002; Buhalis & Law, 2008; Navío-Marco et al., 2021). Dukungan pemerintah daerah melalui penetapan status Kecamatan Sekotong sebagai pertimbangan pusat pelayanan pariwisata skala kabupaten/kota dapat membantu proses pemusatan layanan di lokasi rencana kota wisata. Hub-hub pariwisata di sekitar lokasi rencana kota wisata yang rencananya akan berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat dan daerah dapat berperan sebagai *best practices*, pembantu layanan, dan memberikan efek *trickle down* melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi studi. Kebijakan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramenra Tahun 2020-2044 yang mengintegrasikan wilayah studi dengan koridor wisata lokal dan Peraturan Pemerintah 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang mengintegrasikan lokasi studi dengan koridor wisata regional dan nasional membentuk potensi interdependensi dan interkoneksi kota wisata rencana.

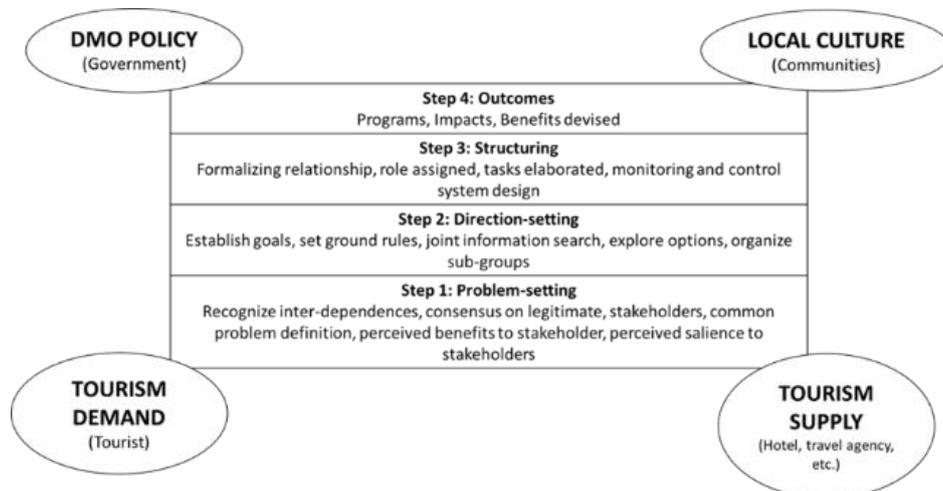
Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi rute terusan yang dapat dibentuk melalui pemanfaatan interdependensi dan interkoneksi lokasi studi dengan pusat-pusat lain di sekitarnya.



Sumber: Analisis, 2023

Gambar 8. Potensi Interkoneksi Kota Wisata Rencana dengan Destinasi Pariwisata di Pulau Lombok dan Sekitarnya

Kuadran pelaksana skema *Public-Private-People Partnership* dalam pengembangan ini meliputi: (1) pihak *public* (pemerintah) berperan sebagai koordinator yang mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan pihak; (2) pihak *private* (pelaku usaha sektor privat/*tourism supplier*) yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut; (3) unsur *people* (masyarakat lokal) berperan dalam menjaga keaslian budaya lokal melalui aktivitas sosial dan wirausaha; dan (4) unsur *tourism demand* berperan sebagai pengguna barang dan jasa industri pariwisata. Identifikasi *stakeholders* pelaksana skema P4 dalam penelitian ini diperoleh dari modifikasi temuan Buhalis (Buhalis, 2002) dan Wan et al. (2022) Tahapan pelaksanaan skema ini: (1) identifikasi isu pengembangan kota wisata; (2) penetapan tujuan dan arah pengembangan kota wisata; (3) strukturisasi tanggung jawab *stakeholders* dalam pengembangan kota wisata; dan (4) proyeksi program, dampak, dan keuntungan pelaksanaan pengembangan kota wisata. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan pengembangan kota wisata dan aktivitas pariwisata sembari mencegah gesekan masyarakat setempat (Milano et al., 2019; Zmyslony & Kowalczyk-Aniol, 2019).



Sumber: Modifikasi dari Wan et al. (2022) dan Zhang & Kumaraswamy (2012)

Gambar 9. Skema Pengembangan P4 di Wilayah Studi

5. KESIMPULAN

Stakeholder pengembangan kota wisata di Kecamatan Sekotong perlu mempertimbangkan penyediaan infrastruktur-infrastruktur kritis seperti jalan raya, jaringan listrik, dan air bersih. Penyediaan infrastruktur kritis memerlukan komitmen jangka panjang antara pelaku usaha sektor privat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Adanya rencana pembangunan hub-hub pariwisata baru seperti KEK Mandalika dan *Key Tourism Areas* Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD) di sekitar lokasi studi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kota wisata. Pengembangan hub pariwisata oleh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan penyediaan infrastruktur fisik dapat berdampak pula pada perbaikan kualitas infrastruktur di daerah tersebut. Beban finansial dan manajemen yang harus ditanggung oleh *stakeholders* pengembangan kota wisata juga dapat diringankan sebagai dampak sampingnya. Selain itu, rencana pengembangan hub-hub pariwisata di sekitar lokasi studi juga dapat membentuk interkoneksi antara lokasi kota wisata rencana dengan pulau-pulau di sekitarnya. Hal ini berarti lokasi rencana kota wisata memiliki peluang untuk terhubung dengan jaringan destinasi wisata regional dan nasional di masa yang akan datang.

Pengembangan dan pengelolaan Kecamatan Sekotong secara legal akan dilaksanakan secara KSU untuk menjaga independensi pengelolaan dan mengurangi beban pengelola TWA Bangko-bangko. KSU tersebut akan dilaksanakan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang apabila ada peluang pengembangan kedepannya. Pendekatan konservasi yang akan dilakukan adalah melalui pemasaran kota wisata secara eksklusif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membatasi jumlah pengunjung melalui pengaturan harga dan mekanisme pasar. Hal ini perlu dilakukan untuk menyeimbangkan daya dukung lingkungan dengan keuntungan dari kegiatan pariwisata.

Skema pengembangan dan pengelolaan kota wisata di Kecamatan Sekotong berbentuk *Public-Private-People Partnership* yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah, masyarakat setempat, serta pengguna barang dan jasa hasil industri pariwisata. Kuadran pengelolaan yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain *DMO Policy* (pemerintah), *Local Culture* (masyarakat lokal), *Tourism Supply* (pelaku usaha sektor privat), dan *Tourism Demand* (wisatawan). Pengembangan dan pengelolaan dilakukan dengan tahap identifikasi isu, penetapan arah pengembangan, pembagian tanggung jawab, dan proyeksi manfaat pengembangan kota wisata. Penggunaan skema ini diharapkan dapat mengurangi gesekan yang timbul antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan kota wisata.

Keluaran akhir penelitian sudah mampu memenuhi tujuan penelitian. Topik yang kemungkinan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya adalah pembiayaan pengembangan kota wisata. *Gap* penelitian potensi bahasan tersebut adalah belum banyak diterapkannya skema KSU di daerah yang belum memiliki infrastruktur kritis. Informasi proyeksi keuntungan dan jangka waktu pencapaian *break even point* akan sangat membantu pertimbangan perencanaan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi atraksi ekonomi. Pelaku usaha sektor swasta juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam pengembangan daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Daya dukung lingkungan untuk kegiatan pariwisata pesisir terutama di Kecamatan Sekotong juga dapat menjadi potensi bahasan di masa yang akan datang. Kerawanan bencana alam di bagian selatan Pulau Lombok, keberadaan flora dan fauna yang dilindungi, serta belum memadainya fasilitas kritis akan mempengaruhi daya dukung lahan untuk kegiatan pariwisata. Jumlah pengunjung yang dapat dilayani secara optimal sangat dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Keluaran penelitian ini, disandingkan dengan proyeksi kebutuhan pengembangan wisata di Pulau Lombok, dapat membantu kajian rekomendasi kebijakan pariwisata di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amore, A. (2019). *Tourism and Urban Regeneration: Processes Compressed in Time and Space*. Oxfordshire: Routledge. Diakses dari: <https://www.amazon.com/Tourism-Urban-Regeneration-Compressed-Hospitality-ebook/dp/B07W8HVGSS>
- Arabadzhyan, A., Figini, P., García, C., González, M. M., Lam-gonzález, Y. E., & León, C. J. (2020). Climate Change, Coastal Tourism, and Impact Chains-a Literature Review. *Current Issues in Tourism*, 24(16), 1–36. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1825351>
- Ayaz, N. (2012). *Rural Tourism and Its Stakeholders: a Research on the Attitudes of the Mayors*. Turkey.
- Azzali, Simona, Kamble, Zilmiyah, Thirumaran, K., Wong, C., ... Jason. (2020). Chapter 8 - Mitigating Impact From Natural Disasters, Building Resilience in Tourism: The Case of Kerala. In *Economic Effects of Natural Disasters: Theoretical Foundations, Methods, and Tools* (pp 119–129). London: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817465-4.00008-X>
- Bates, B., & Hersey, K. (2016). Lessons Learned from Bison Restoration Efforts in Utah on Western Rangelands. *RALA*, 38(5), 256–265. <https://doi.org/10.1016/j.rala.2016.08.010>

- Beh, L.-S. (2015). Managing Across Public-Private Partnerships: a Review of Implementation in China And Australia. *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, 1(3), 663–698. Diakses dari: [https://licaps.nsysu.edu.tw/var/file/131/1131/img/2375/CCPS1\(3\)-Beh.pdf](https://licaps.nsysu.edu.tw/var/file/131/1131/img/2375/CCPS1(3)-Beh.pdf)
- Belgrano, A., & Villasante, S. (2020). Linking Ocean's Benefits to People (OBP) with Integrated Ecosystem Assessments (IEAs). *Population Ecology*, 63(1), 102–107. <https://doi.org/10.1002/1438-390X.12064>
- BKSDA NTB. (2018). Kesepakatan Penyelesaian Konflik di TWA Bangko-Bangko antara BKSDA NTB dengan Kelompok Masyarakat Lestari Bangko-Bangko. Diakses dari: <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/5157/kesepakatan-penyelesaian-konflik-di-twa-bangko-bangko-antara-bksda-ntb-dengan-kelompok-masyarakat-lestari-bangko-bangko.html>
- BPS Kabupaten Lombok Barat. (2022). *Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka*. Kabupaten Lombok Barat: BPS Kabupaten Lombok Barat. Diakses dari: <https://lombokbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/bc3a3a5180ecdd9e1c0d4179/kabupaten-lombok-barat-dalam-angka-2022.html>
- Buckley, R. (2013). *Role of Tourism*. *Encyclopedia of Biodiversity (Second Edition)* 222-225. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00308-7>
- Buhalis, D. (2002). Marketing the Competitive Destination of the Future-Growth Strategies for Accommodation Establishments in Alpine Regions. *Tourism Management Special Issue: The Competitive Destination*, 21(1). [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00095-3](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3)
- Buhalis, D., & Law, R. (2008). *Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years on and 10 Years After the Internet—the State of Etourism Research*. 29, 609–623. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005>
- Carlsen, J., & Butler, R. (2011). *Island Tourism: Sustainable Perspectives*. Wallingford: CABI. Diakses dari: <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9781845936792.0000>
- Chaolin, G. U. (2020). Urbanization. *International Encyclopedia of Human Geography*, 141–153. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10355-5>
- Chidakel, A., & Child, B. (2022). Convergence and Divergence in the Economic Performance of Wildlife Tourism Within Multi-Reserve Landscapes. *Land Use Policy*, 120(106252). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106252>
- Christaller, W. (1980). *Die zentralen Orte in Süddeutschland: Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen*. Darmstadt: Academic in Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Diakses dari <https://www.amazon.de/zentralen-Orte-Süddeutschland-ökonomisch-geographische-Gesetzmäßigkeit/dp/3534197364>
- Costanza, R., Groot, R. De, Sutton, P., Ploeg, S. Van Der, Anderson, S. J., Kubiszewski, I., ... Turner, R. K. (2014). Changes in the Global Value of Ecosystem Services. *Global Environmental Change*, 26, 152–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>
- Deely, J., Hynes, S., Cawley, M., & Hogan, S. (2023). Modelling Domestic Marine and Coastal Tourism Demand Using Logit and Travel Cost Count Models. *Economic Analysis and Policy*, 77, 123–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.11.003>
- Duignan, M. (2019). *“Overtourism”? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions Volume 2: Case Studies Executive Summary*. Madrid: United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Diakses dari: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420643>
- European Commission. (2003). *Guidelines for Successful Public-Private Partnerships*. Brussels: European Commission Directorate General Regional Policy.
- First Lombok Tour. (2019). Berwisata Alam dan Sejarah Di Hutan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko Lombok. Diakses dari: <https://firstlomboktour.com/wisata-gunung/wisata-alam-di-hutan-wisata-alam-bangko-bangko-lombok>
- Francis, J. R. (2022). *The Ultimate Guide to Desert Point Surf*. Diakses dari: <https://thesurfatlas.com/surfing-indonesia/desert-point-surf/>
- Godoy, C. C. N., Pienaar, E. F., & Branch, L. C. (2022). Willingness of Private Landowners to Participate in Forest Conservation in the Chaco Region of Argentina. *Forest Policy and Economics*, 138(102708). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102708>
- Gospodini, A. (2020). Urban Design: the Evolution of Concerns, the Increasing Power, Challenges and Perspectives. *Journal of Urban Design*, 25(1), 16–20. <https://doi.org/10.1080/13574809.2019.1706894>
- Hernandez, M. M. G., Leon, C. J., Garcia, C., & Lam-Gonzales, Y. E. (2023). Assessing The Climate-Related Risk of Marine Biodiversity Degradation for Coastal and Marine Tourism. *Ocean & Coastal Management*, 232 (106436). <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106436>
- Horwath, H. T. L. (2017). *Lombok Baseline Demand & Supply, Market Demand Forecasts, and Investment Needs*. Diakses dari https://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf
- Ivars-Baidal, J. A., Vera-Rebollo, J. F., Perles-Ribes, J., Femenia-serra, F., & Celdrán-Bernabeu, M. A. (2021). Sustainable Tourism Indicators: What's New Within The Smart City/Destination Approach? *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), 1556–1582. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1876075>
- Jamnadass, R., Langford, K., Anjarwalla, P., & Mithöfer, D. (2014). Public-Private Partnerships in Agroforestry. *Encyclopedia of Agriculture and Food Systems*, 544–564. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00026-7>
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (2019). *Buku Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019*. Mataram: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Diakses dari <https://dislutkan.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/BUKU-PROFIL-DINAS-2019.pdf>

- Khafid, S. (2021). Menuju Sekotong yang Mendunia, Ragam Fasilitas Pendukung Wisata Dilengkapi. Diakses dari Tempo website: <https://travel.tempo.co/read/1445966/menuju-sekotong-yang-mendunia-ragam-fasilitas-pendukung-wisata-dilengkapi>
- Kokkrainal, J., & Baum, T. O. M. (2011). Tourism and Sustainability in the Lakshadweep Islands. In *Island tourism: sustainable perspectives*. Wageningen: CABI. Diakses dari <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.1079/9781845936792.0054>
- Kowalczyk-Aniol, J. (2023). Rethinking Tourism-Driven Urban Transformation And Social Tourism Impact: a Scenario From A CEE City. *Cities*, 134(104178). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104178>
- Kurniawan, F., Adrianto, L., Bengen, D. G., & Prasetyo, L. B. (2016). Vulnerability Assessment of Small Islands to Tourism: The Case of the Marine Tourism Park of the Gili Matra Islands, Indonesia. *Global Ecology and Conservation*, 6, 308–326. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.04.001>
- Lavia, L., Witchel, H. J., Aletta, F., Steffens, J., Flebig, A., Kang, J., ... Healey, P. G. T. (2018). Non-Participant Observation Methods for Soundscape Design and Urban Planning. In *Handbook of Research on Perception-Driven Approaches to Urban Assessment and Design* (pp. 73–99). Hershey: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3637-6.ch004>
- Lee, S.-H., Choi, J.-Y., Yoo, S.-H., & Oh, Y.-G. (2013). Evaluating Spatial Centrality for Integrated Tourism Management in Rural Areas Using GIS and Network Analysis. *Tourism Management*, 34, 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.005>
- Macleod, D. V. L. (2004). *Tourism, Globalisation and Cultural Change: An Island Community Perspective (Tourism and Cultural Change, 2)*. Bristol: Channel View Publications. Diakses dari <https://www.amazon.com/Tourism-Globalisation-Cultural-Change-Perspective/dp/1873150725>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144664/pmk-no-115pmk062020>
- Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J. M. (2019). Overtourism and Tourismphobia: A Journey Through Four Decades of Tourism Development, Planning and Local Concerns. *Tourism Planning & Development*, 16(4), 353–357. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604>
- Monzón, A., Ortega, E., & López, E. (2013). Efficiency and Spatial Equity Impacts of High-Speed Rail Extensions in Urban Areas. *Cities*, 30, 18–30. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.11.002>
- Navío-Marco, J., Ruiz-Gómez, L. M., & Sevilla-Sevilla, C. (2021). Progress in Information Technology and Tourism Management: 30 Years on and 20 Years After the Internet - Revisiting Buhalis & Law's Landmark Study About Etourism. *Tourism Management*, 69, 460–470. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.002>
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramenra Tahun 2020-2044*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188972/perpres-no-84-tahun-2021>
- Rai, V. P., Ranjan, R., Gadhiya, A. R., & Mote, B. M. (2021). Chapter 22 - Use of Modern Physical Tools for Mitigating the Effect of Abiotic Stresses. *Stress Tolerance in Horticultural Crops*, 387–397. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822849-4.00018-8>
- Rakhman, F. (2019). Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana. Diakses dari: <https://www.mongabay.co.id/2019/01/11/ladang-jagung-rambah-hutan-ntb-picu-bencana/>
- Ritzer, G. (2007). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Chichester: John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781405165518>
- Romanczyk, K. (2018). Pułapki Rewitalizacji. Przypadek Krakowa. *Studia Regionalne i Lokalne*, 4(74), 5–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7366/1509499547401>
- Saayman, M., Merwe, P. Van Der, & Saayman, A. (2018). The Economic Impact of Trophy Hunting in the South African Wildlife Industry. *Global Ecology and Conservation*, 16, e00510. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00510>
- Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. (2022). Dewan Nasional KEK. Diakses dari: <https://kek.go.id/dewan-nasional-kek>
- Shine, R., & Somaweera, R. (2019). Last Lizard Standing : the Enigmatic Persistence of the Komodo Dragon. *Global Ecology and Conservation*, 18, e00624. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00624>
- Sideman, I. A. O. S., Budiarta, R. M. N., Adnyana, I. B. P., & Dwijendra, N. K. A. (2022). Risk Analysis of Shared Marine Space in the View of Traditional Fishermen Perceptions in the National Tourism Strategic Area of Lombok, Indonesia. *Proceedings of the 5th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering*, 1043–1054. Surakarta: ICRMCE. Diakses dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-9348-9_92
- Smart, J., Huberman, J., & Scott, C. (2022). *Desert Point*. Diakses dari <https://www.indosurf.com.au/lombok/desert-point>
- Wabnitz, C. C. C. (2019). Adapting Tourist Seafood Consumption Practices in Pacific Islands to Climate Change. In *Predicting Future Oceans*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817945-1.00020-4>
- Wan, Y. K. P., & Bramwell, B. (2015). Political Economy and the Emergence of a Hybrid Mode of Governance of Tourism Planning. *Tourism Management*, 50, 316–327. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.010>
- Wan, Y. K. P., Li, X., Lau, V. M.-C., & Dioko, L. (Don). (2022). Destination Governance in Times of Crisis And the Role of Public-Private Partnerships in Tourism Recovery from Covid-19: the Case Of Macao. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 51, 218–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.012>
- Wang, P., Wang, J., Zhang, J., Ma, X., Zhou, L., & Sun, Y. (2022). Spatial-Temporal Changes in Ecosystem Services and Social-Ecological Drivers in a Typical Coastal Tourism City: a Case Study of Sanya, China. *Ecological Indicators*, 145, 109607. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109607>
- Wang, X., Huang, S., Zou, T., & Yan, H. (2012). Effects of the High Speed Rail Network on China's Regional Tourism Development. *Tourism Management Perspective*, 1, 34–38. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2011.10.001>

- Zhang, J., & Kumaraswamy, M. M. (2012). Public-Private-People Partnerships (4P) for Disaster Preparedness, Mitigation and Post-disaster Reconstruction. *The 8th Annual Conference of the International Institute for Infrastructure, Renewal and Reconstruction (IIIRR)*, 407–416. Kumamoto: Creative Commons: Attribution 3.0 Hong Kong License. Diakses dari <https://hub.hku.hk/bitstream/10722/169406/1/Content.pdf>
- Zmyslony, P., & Kowalczyk-Aniol, J. (2019). Urban Tourism Hypertrophy: Who Should Deal With It? The Case of Krakow (Poland). *International Journal of Tourism Cities*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJTC-07-2018-0051>